

Perempuan Petani dalam Kuasa Patriarki: Studi Ekofeminisme di Subak Bulung Daya Desa Antap Kabupaten Tabanan Bali

Ni Made Wiasti^{1*}, I Nyoman Suarsana²

^{1,2} Universitas Udayana

DOI: <https://doi.org/10.24843/JKB.2023.v13.i01.p07>

Abstract

Women Farmer in Patriarchal Power: Eco-feminism Study in Subak Bulung Daya Antap Village Tabanan Regency Bali

Despite the Balinese people having strong eco-feminism based on their religious beliefs, five patriarchal powers have marginalized their role in the traditional rice-field system, known as subak. This paper seeks to demonstrate the existence of women farmers within patriarchal power with an ecofeminism approach in Subak Bulung Daya, Antap Village, Tabanan Regency. Qualitative methods with critical ethnographic analysis were implemented. According to this study, women are responsible for carrying out agricultural rituals and helping their husbands in all agricultural activities. However, patriarchal power marginalizes women in the subak system and must accept a double burden in the domestic and public spheres, thus demonstrating a paradoxical model of eco-feminism. This study found that even in patriarchal oppression, Balinese women still play an important role in maintaining ecological balance through various rituals as local wisdom.

Keywords: ecofeminism; patriarchal power; subak; women farmer

1. Pendahuluan

Masyarakat dunia dihadapkan dengan kondisi lingkungan yang kian mengkhawatirkan dan berpotensi mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi, seperti pemanasan global, efek rumah kaca, emisi karbon, serta perubahan iklim. Kondisi ini mendorong tumbuhnya kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan ekologis yang bersih, sehat, dan hijau sehingga menginspirasi munculnya berbagai gerakan sosial. Salah satunya adalah ekofeminisme yang dipelopori oleh d'Eaubonne (1974) yang memadukan pemikiran dan gerakan sosial feminisme dengan

* Penulis Koresponden: mwiasti@yahoo.com

Artikel Diajukan: 2 Januari 2023; Diterima: 5 Maret 2023

ekologi. Asumsi dasarnya bahwa perempuan dan alam berhubungan secara kultural. Feminisme dipandang memiliki hubungan konseptual, simbolik, dan linguistik dengan isu-isu ekologis, seperti bumi disebut ibu (Tong, 2006). Ekofeminisme juga mengembangkan gagasan kritis bahwa perempuan dan alam mempunyai kesamaan, yakni sama-sama ditindas kekuasaan patriarki (Glazebrook, 2002; Wijayanti, dkk, 2019). Studi ekofeminisme memusatkan perhatian pada isu-isu feminisme, ekologi, serta budaya patriarki, misalnya perjuangan Aleta Baun di Molo Nusa Tenggara Timur dan gerakan Ibu Bumi di Kendeng, Jawa Tengah (Sulistiyawati, 2018; Dalopo, 2020).

Secara ideologis, masyarakat Bali memiliki basis ekofeminisme yang mengakar kuat dalam kepercayaan religiusnya. Masyarakat Hindu di Bali meyakini bahwa beberapa entitas ekologis berkaitan erat dengan manifestasi Tuhan dalam wujud feminin (*shakti*), misalnya sungai (Dewi Gangga), danau (Dewi Danu), bumi (Dewi Perthiwi), dan sawah (Dewi Sri) (Suatama, dkk., 2022). Pemujaan kepada 'Dewi' menunjukkan cara orang Bali memuliakan alam karena secara simbolis perempuan melambangkan kesuburan dan kesejahteraan. Akan tetapi, perempuan Bali harus berhadapan dengan kultur patriarki yang memosisikan laki-laki sebagai sentral dalam relasi gender (Wiranata dan Putri, 2021).

Kuasa patriarki yang ternaturalisasi dalam sistem kekerabatan patrilineal bukan hanya mensubordinasi perempuan Bali dalam hak waris, melainkan juga dalam praktik sosial (Wiasti, 2008; Dyatmikawati, 2013). Masrurroh (2022) mencontohkan bahwa perempuan Bali yang sudah menikah dituntut untuk menjalankan peran rumah tangga, adat istiadat dan keagamaan, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam konteks ekofeminisme, budaya patriarki memaksa perempuan Bali untuk lebih banyak mengambil peran-peran domestik, ketimbang peran publik (Firdaus, 2001). Konstruksi budaya patriarki juga membatasi peran dan partisipasi perempuan Bali dalam pengambilan keputusan pada ruang publik, terutama bidang adat istiadat (Rhoad, 2013). Perempuan Bali tidak pernah menduduki jabatan strategis dalam struktur lembaga-lembaga adat, seperti desa adat, *banjar*, dan *subak*. Padahal ketiga lembaga tradisional ini mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan publik berkaitan dengan sistem ekologis yang dalam terminologi adat Bali disebut *palemahan*. Fenomena ini menegaskan bahwa perempuan Bali tidak mendapatkan ruang yang produktif untuk melakukan peran-peran ekologis. Implikasinya bahwa pengambilan keputusan publik terkait dengan *palemahan* dikendalikan oleh kuasa patriarki. Posisi dan peran ekologis perempuan Bali dalam konstruk budaya patriarki menarik dikaji dalam konteks ekofeminisme.

Fenomena peminggiran perempuan Bali dalam budaya patriarki, juga dijumpai dalam kehidupan perempuan petani pada Subak Bulung Daya di Desa Antap, Kecamatan Selamadeg, Kabupaten Tabanan. Aktivitas pertanian di Subak Bulung Daya menunjukkan banyaknya petani perempuan yang terlibat aktif di dalamnya, bahkan mereka mampu menggunakan teknologi pertanian tepat guna (Wiasti dan Arjani, 2021). Walaupun demikian, mereka bukanlah pemilik sah lahan yang digarap karena dalam budaya patriarki hak kepemilikan atas lahan cenderung berada di pihak laki-laki. Implikasinya bahwa terjadi peminggiran perempuan dalam organisasi *subak* yang ditandai dengan tidak dilibatkannya perempuan dalam struktur kepengurusan Subak Bulung Daya.

Selain itu, perempuan petani Subak Bulung Daya juga tetap melaksanakan peran-peran domestik di keluarga dan aktivitas sosioreligius, baik di tingkat *banjar* maupun desa adat. Kompleksitas peran yang dijalani perempuan petani Subak Bulung Daya ini tentunya tidak sebanding dengan kedudukan mereka dalam hal kepemilikan lahan dan organisasi *subak* yang sepenuhnya dikendalikan kaum laki-laki. Fenomena ini menegaskan bahwa perempuan petani di Subak Bulung Daya harus menerima arogansi patriarki sehingga melahirkan ketergantungan, ketidakadilan, serta penindasan yang ternaturalisasi dalam sistem sosial.

Studi ini bertujuan mengeksplorasi fenomena tersebut secara holistik dan mendalam melalui pendekatan ekofeminisme sehingga dapat mengurai berbagai relasi kuasa patriarki yang beroperasi di dalamnya. Refleksi kritis terhadap eksistensi perempuan petani *subak* dalam kuasa patriarki sekiranya dapat melahirkan perspektif teoretis yang bermanfaat bagi pengembangan khazanah kajian Bali, terutama di bidang antropologi gender dan feminisme.

Studi ini juga diharapkan dapat menginspirasi berkembangnya kesadaran partisipatif dan emansipatif para perempuan petani Bali dalam mewujudkan lingkungan ekologis yang ramah sosial, budaya, sekaligus bebas dari relasi-relasi kuasa patriarki yang hegemonik. Dengan demikian, kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam pemberdayaan lingkungan ekologis di Bali dapat diwujudkan pada masa depan.

2. Kajian Pustaka

Studi ekofeminisme yang memfokuskan analisisnya pada sirkularitas hubungan alam-lingkungan, perempuan, dan kuasa patriarki sudah banyak dilakukan para peneliti terdahulu. Namun, secara spesifik belum ditemukan kajian tentang ekofeminisme perempuan petani di Subak Bulung Daya. Oleh karenanya, kajian pustaka ini menyajikan beberapa hasil studi dalam rentang waktu lima tahun terakhir yang relevan dengan penelitian ini. Hasil-hasil

studi terdahulu tersebut dikaji secara kritis untuk menggali persamaan dan perbedaan fokus kajiannya, keunggulan dan kelemahan dalam analisis yang digunakan, aspek-aspek yang belum diungkap, serta kontribusinya dalam penelitian ini.

Priyatna, dkk., (2017) dalam “Ekofeminisme dan Gerakan Perempuan di Bandung” mengungkap gerakan tiga ibu rumah tangga di Bandung yang peduli dengan masalah lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Rutinitas domestik dalam rumah tangga memotivasi mereka untuk menjaga kualitas lingkungan. Gerakan ini semula berskala kecil, tetapi mampu menginspirasi ibu-ibu rumah tangga yang lain untuk melakukan aktivitas serupa. Aspek menarik dari studi tersebut bahwa ekofeminisme melalui rutinisasi tindakan keseharian dapat menginspirasi munculnya gerakan sosial yang lebih besar. Gerakan ekofeminisme melalui tindakan keseharian inilah kontribusi utama studi tersebut dalam upaya memahami ekofeminisme perempuan petani di Subak Bulung Daya.

Sulistiyawati (2018) dalam studinya yang berjudul “Pembangunan dan Feminisasi Tanah di Indonesia (Kajian Ekofeminisme Global)” melakukan kajian kritis terhadap eksploitasi lingkungan di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, dan gunung Mollo, Nusa Tenggara Timur. Studi ini menemukan bahwa feminisasi tanah (lingkungan) telah menyebabkan eksploitasi secara massif yang mengakibatkan kerusakan ekologis di kedua wilayah tersebut. Hal ini mendorong lahirnya gerakan ekofeminisme “Ibu Bumi” di Kendeng dan perjuangan Aleta Baun di Mollo. Selain lokus studinya berbeda, juga perbedaannya terletak pada fokus studi tersebut yang tidak secara spesifik mengkaji peran perempuan dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah sekitar dua gunung tersebut.

Maulana dan Supriatna (2019) juga melaksanakan studi dengan judul “Ekofeminisme: Perempuan, Alam, Perlawanan atas Kuasa Patriarki dan Pembangunan Dunia (*Wangari Maathai dan Green Belt Movement 1990-2004*)”. Studi ini mengungkap gerakan ekofeminisme yang dilakukan oleh Wangari Maathai, seorang aktivis perempuan asal Kenya. Maathai gencar mengkritisi program pembangunan yang dipandang tidak ramah terhadap lingkungan dan perempuan. Ia mencoba mengubah stigma buruk perempuan melalui gerakan *Green Belt Movement* (gerakan menanam pohon) sebagai aksi nyata untuk menunjukkan bahwa perempuan mampu berperan bagi penyelamatan lingkungan dan kehidupan. Berbeda dengan hasil studi tersebut, penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji gerakan ekofeminisme yang dilakukan oleh tokoh tertentu di Subak Bulung Daya, tetapi peran perempuan petani dalam konteks ekofeminisme.

Dalopo (2020) dalam studinya “Dari Hutan ke Politik: Studi terhadap Ekofeminisme Aleta Baun di Mollo-NTT” mengkaji gerakan ekofeminisme yang dilakukan Aleta Baun dalam menolak pertambangan di Mollo melalui jalur politik. Gerakannya dilandasi kearifan lokal masyarakat Timor bahwa lingkungan sama dengan tubuh manusia sehingga bila salah satu bagiannya mengalami disfungsi, maka akan berdampak pada bagian yang lain. Kearifan lokal ini dijadikan narasi untuk mengorganisasi perjuangan masyarakat adat dan perempuan yang akhirnya berhasil mengusir korporasi tambang. Secara umum, kearifan lokal tersebut juga ditemukan dalam kepercayaan orang Bali bahwa tubuh manusia (*bhuwana alit*) mempunyai elemen yang sama dengan alam semesta (*bhuwana agung*). Kearifan ini menjadi nilai teo-ekologis yang relevan dikembangkan dalam konteks ekofeminisme.

Yasin, dkk., (2021) dalam studi yang berjudul “Gerakan Ekofeminisme Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga pada Komunitas Zona Bening di Kota Batu-Jawa Timur” menemukan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan anggota komunitas Zona Bening dapat dipandang sebagai gerakan ekofeminisme karena seluruh aktornya adalah perempuan dan berkontribusi bagi kelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan postulat teori ekofeminisme Vandana Shiva bahwa kesadaran perempuan untuk melakukan gerakan ekologis dalam rangka harmonisasi hubungan manusia dengan alam-lingkungan merupakan sentral pemikiran ekofeminisme. Kontribusi penting studi tersebut terletak pada implementasi teori ekofeminisme Vandana Shiva dalam studi lapangan yang berhubungan dengan gerakan lingkungan yang dilakukan kaum perempuan.

Amsal dan Putri (2022) melakukan studi berjudul “Ekofeminisme ala Masyarakat Kajang: Ilmu dan Amalnya”. Studi ini menemukan bahwa dalam kepercayaan dan ajaran masyarakat Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, alam adalah ibu (*kamasea-masea*). Kepercayaan ini menjadi antitesis dan kritik terhadap paradigma pembangunan-patriarki yang dipandang menimbulkan berbagai dampak lingkungan. Pada prinsipnya, kepercayaan tersebut serupa dengan kepercayaan masyarakat Hindu di Bali bahwa alam adalah ibu yang menjadi basis ekofeminisme dalam praktik sosial kulturalnya. Akan tetapi, perbedaan lokus studi mengisyaratkan perbedaan karakteristik masyarakat sehingga niscaya menghasilkan analisis yang berbeda pula.

3. Metode dan Landasan Teori

Lokasi penelitian ini adalah di Subak Bulung Daya, Desa Antap, Kecamatan Selamadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Subak Bulung Daya merupakan organisasi pertanian tradisional Bali yang mewadahi petani pemilik sawah di wilayah tersebut. Pada saat penelitian ini dilakukan (2022),

Subak Bulung Daya memiliki 180 anggota dengan lahan sawah seluas 2,324 Ha. Organisasi *subak* dipimpin *Pakaseh* atau *Klian Subak* yang dijabat oleh I Wayan Kuweta, dibantu oleh I Nyoman Masta sebagai Wakil *Pakaseh*, I Ketut Suta sebagai Sekretaris, Abdul Halim alias Pan Linda sebagai Bendahara, serta beberapa *Klian Tempek* atau *Empelan*, dan *Kasinoman*. Pengurus *subak* bertugas mengkoordinasikan berbagai kebutuhan dan kepentingan petani, baik dalam urusan internal maupun eksternal. Urusan internal misalnya, tata kelola dan pembagian irigasi, sedangkan urusan eksternal seperti hubungan petani dengan pemerintah ataupun pihak-pihak terkait lainnya (Wiasti dan Suarsana, 2022). Subak Bulung Daya memiliki *bale subak* yang digunakan untuk melaksanakan berbagai aktivitas organisasi (Foto 1).



Foto 1. Bale Subak Bulung Daya (Foto: Wiasti dan Suarsana, 2022)

Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis (*critical ethnography*). Apabila etnografi konvensional lebih memusatkan kajiannya untuk mendeskripsikan dan memahami budaya suatu masyarakat (Spradly, 2006), maka etnografi kritis lebih mengedepankan tanggung jawab moral untuk menyadarkan masyarakat dari ketidakadilan dan marginalisasi akibat penyimpangan praktik budaya (Madison, 2005). Pendekatan etnografi kritis bertujuan membantu, mencerahkan, dan memberdayakan kelompok-kelompok marjinal (Creswell, 2008; Palmer, dkk., 2016). Asumsi teoritis yang dibangun

bahwa budaya tidak pernah netral dari praktik-praktik kekuasaan sehingga data etnografi yang diperoleh melalui penelitian lapangan harus dibaca secara kritis untuk membongkar berbagai relasi kuasa yang tersimpul di dalamnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data tersebut dikodifikasi berdasarkan fokus penelitian, yakni rutinitas perempuan petani *subak*, hegemoni patriarki dalam sistem *subak*, dan implikasinya terhadap eksistensi perempuan petani *subak* dalam peran sosial dan ekologisnya. Analisis data melalui tiga tahapan analisis deskriptif-kualitatif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Miles & Haberman, 1992).

Interpretasi data dilakukan dengan menerapkan model *thick description* yang dikembangkan oleh Geertz (1973), yakni *'thinking and reflecting'* dan *'thinking of thought'*. Artinya, interpretasi data dilakukan secara terus menerus melalui penyegaran pemikiran dan gagasan yang bersumber dari literatur-literatur sebelumnya; perspektif dan pemikiran teoritis tertentu, serta konsep-konsep spesifik yang disampaikan para informan.

Landasan teori yang digunakan adalah ekofeminisme Vandana Shiva, seorang pemikir dan aktivis ekofeminis asal India (Chatterjee, 2022). Shiva dan Mies (1993) mengawali gagasan ekofeminismenya dengan mengkritisi ilmu pengetahuan modern yang reduksionis, serta kebijakan pembangunan yang bercorak patriarki sehingga menimbulkan berbagai bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan dan alam. Shiva (1997) pun berpandangan bahwa alam (hutan) akan kembali lestari dan perempuan akan mendapatkan hak-haknya secara adil, apabila kebijakan pembangunan menghidupkan kembali prinsip feminitas (*tera mater*) yang bercirikan kedamaian, keselamatan, kasih, dan kebersamaan. Prinsip ini kontras dengan maskulinitas yang bercirikan persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan.

Shiva (1997) menggunakan pendekatan antropologi metafisik untuk mencermati hubungan kapitalisme dan patriarki dengan membandingkan India "pra" serta "pasca" kolonisasi Inggris. Masyarakat India prakolonial menempatkan hutan sebagai penopang kehidupan pertanian, sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi yang memberi banyak kemudahan bagi perempuan. Alam dan perempuan mendapatkan penghargaan tinggi sebagai pemroduksi dan pereproduksi kehidupan.

Pemerintah kolonial Inggris berperan dalam mengubah paradigma masyarakat India dari fungsi hutan sebagai penopang kehidupan ke fungsi komersial yang berimplikasi terhadap perubahan nilai dan cara pandang kepada perempuan. Kerja perempuan pun tidak dihargai, diremehkan, dan dipandang tidak efisien sehingga diganti dengan mesin-mesin industri yang sebagian besar dioperasikan kaum laki-laki. Kajian antropologi membuka

wawasan bahwa sistem kapitalisme berhubungan erat dengan patriarki yang lebih banyak merugikan perempuan.

Kritik Shiva (1997) terhadap kapitalisme patriarki diarahkan pada lima hal berikut. *Pertama*, patriarki sebagai ideologi mencakup sekumpulan sistem nilai, norma, falsafah, kepercayaan religius, pengetahuan, wawasan, dan kaidah etis tentang dunia etos yang diyakini, dijunjung, serta diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat yang secara substansial sistem nilainya lebih banyak menguntungkan dan melindungi kepentingan kaum laki-laki. *Kedua*, patriarki sebagai cara pandang melihat keberadaan manusia secara dualistik sehingga membangun stereotip yang lebih menguntungkan laki-laki.

Ketiga, relasi-relasi sosial antarmanusia dan manusia dengan alam tidak dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan, melainkan hirarki, dominasi, kompetisi, dan hegemoni. *Keempat*, pola pikir dominan yang dikembangkan patriarki secara epistemologi bercorak reduksionis. *Kelima*, dampak negatif yang dihasilkan pemikiran patriarki memunculkan ketidakadilan terhadap perempuan dan alam (Shiva, 1988, 1997, 2005).

Budaya patriarki dalam masyarakat patrilineal seperti di Bali, menjadi ideologi dominan yang ternaturalisasi dalam sistem sosial sehingga merebut kesadaran masyarakat. Ideologi ini menjadi basis strukturasi masyarakat dan menggerakkan setiap aktor untuk menyesuaikan tindakannya sesuai dengan kultur yang berlaku. Oleh karenanya, untuk mengkaji beroperasinya budaya patriarki dalam kesadaran perempuan petani Subak Bulung Daya digunakan teori strukturasi dan hegemoni.

Menurut Giddens (2010), strukturasi sistem sosial dapat berlangsung melalui arus tindakan terus menerus atau rutinisasi praktik sosial yang dilandasi kesadaran diskursif dan praksis. Sementara itu, Gramsci (dalam Patria dan Arif, 2003) menyatakan bahwa praktik hegemoni terjadi melalui mekanisme konsensus dan kepemimpinan moral-terapeutik.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Rutinitas Perempuan Petani Subak Bulung Daya

Perempuan petani di Subak Bulung Daya sebagian besar merupakan isteri para pemilik lahan sawah yang menjadi anggota organisasi *subak*, tetapi juga ditemukan beberapa buruh tani yang tidak mempunyai lahan sendiri. Oleh karenanya, keterlibatan perempuan petani dalam aktivitas pertanian di Subak Bulung Daya dilandasi oleh motivasi yang berbeda-beda. Bagi isteri pemilik lahan, misalnya Men Wida (47 tahun) mengatakan “*Suba uling pidan tiyang bareng ka carik nguopin kuren tiyange*” (“Sudah dari dulu saya ikut ke sawah membantu suami saya”). Akan tetapi, para perempuan buruh tani ikut ke sawah untuk mendapatkan upah demi membantu keuangan keluarga,

seperti disampaikan Men Adi (49 tahun) “*Titayang maburuh, kuren tiyange ten ngelah carik, pang wenten anggon bekel panak masuk*” (‘Saya bekerja sebagai buruh, suami saya tidak memiliki sawah, supaya ada dipakai bekel anak sekolah’).

Perbedaan motivasi tersebut, juga sekaligus membedakan rutinitas yang dilakukan perempuan petani di sawah. Isteri para pemilik lahan lebih banyak melakukan berbagai aktivitas di sawah, baik yang berkaitan dengan pertanian maupun ritual keagamaan. Sementara itu, para perempuan buruh tani hanya datang ke sawah bila ada pemilik lahan yang memerlukan tenaga mereka untuk membantu aktivitas tertentu, terutama saat *nandur* (‘menanam padi’) dan *manyi* (‘panen’). Aktivitas perempuan petani Subak Bulung Daya dalam kegiatan pertanian di sawah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Foto 2. Perempuan petani menanam padi di Subak Bulung Daya (Wiasti dan Suarsana, 2022)

Foto 2 di atas menunjukkan perempuan petani Subak Bulung Daya sedang menanam padi (*nandur*). Selain menanam padi, mereka juga terlibat dalam aktivitas-aktivitas pertanian lainnya. Mereka melakukan pekerjaan di sawah sebagai bagian dari rutinitas keseharian terutama saat musim bertani tiba, baik untuk membantu suami maupun menjadi buruh harian (*maburuh*). Walaupun demikian, mereka tetap mengerjakan aktivitas-aktivitas domestik sehingga mereka harus mampu membagi waktu dengan baik. Secara umum, rutinitas perempuan petani Subak Bulung Daya ketika musim bertani tiba dapat digambarkan sebagai berikut.

Perempuan petani umumnya bangun lebih awal untuk membersihkan rumah, serta menyiapkan kopi dan sarapan ringan bagi suaminya yang akan

pergi ke sawah. Setelah suami pergi ke sawah, mereka mengurus anak-anak, menyiapkan makanan, dan melaksanakan ritual keagamaan di tempat suci keluarga (*sanggah* atau *merajan*). Setelah seluruh aktivitas tersebut selesai, mereka menyusul suami ke sawah untuk mengantar sarapan dan langsung membantu pekerjaan suami.

Pada waktu anak-anak pulang sekolah, mereka harus pulang untuk menjemput anak ke sekolah dan mengurusnya, sembari menunggu suami pulang dari sawah. Setelah suami datang untuk makan dan istirahat sebentar, mereka berangkat ke sawah bersama untuk melanjutkan aktivitas bertani hingga sore hari. Sepulang dari sawah, mereka menyiapkan makan malam keluarga serta menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang tertunda, sedangkan laki-laki beristirahat sembari menonton televisi. Mereka umumnya bekerja hingga larut malam karena selain menyelesaikan urusan rumah tangga, mereka juga menyiapkan sarana dan prasarana keagamaan (*banten*) yang akan dipersembahkan esok hari. Menjelang tidur, mereka acap kali juga harus melayani kebutuhan biologis suami. Rutinitas semacam ini hampir dilakukan oleh semua perempuan petani Subak Bulung Daya dalam keseharian mereka.

Sementara itu, rutinitas pada ruang publik yang dilakukan perempuan petani Subak Bulung Daya umumnya berkaitan dengan adat dan keagamaan karena mereka hidup dalam lingkungan tradisional perdesaan. Mereka aktif dalam aktivitas-aktivitas adat dan keagamaan dari tingkat *banjar* hingga desa adat. Dalam kegiatan *pasukadukan* seperti, perkawinan dan kematian, mereka umumnya berperan menyiapkan sarana dan prasarana upacara keagamaan. Begitu pula dengan ritual keagamaan kolektif yang berlangsung di sejumlah tempat suci, seperti *kahyangan tiga*, *kahyangan desa*, dan *pura* genealogis, peran perempuan juga cukup dominan, bahkan bisa menghabiskan waktu sehari-hari. Mereka juga terlibat aktif dalam aktivitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di setiap *banjar dinas* (dusun). Apabila dibandingkan dengan laki-laki, peran perempuan petani *subak* dalam aktivitas adat dan keagamaan relatif lebih besar, walaupun secara institusional ruang-ruang tersebut lebih banyak dikendalikan oleh kaum laki-laki.

Fakta menarik lainnya bahwa perempuan petani *subak* mencurahkan waktu kerja yang lebih banyak dalam kegiatan pertanian, daripada laki-laki. Perempuan tidak saja terlibat dalam kegiatan usaha tani (*on farm*), tetapi juga di luar usaha pertanian (*off farm*). Perempuan dipandang lebih sabar dan telaten dalam pengolahan tanah, pembibitan, merawat tanaman, memanen, hingga pascapanen. Oleh karenanya, mereka hampir terlibat dalam seluruh kegiatan usaha tani (*on farm*) dari pekerjaan yang berat untuk menyiapkan lahan (mencangkul atau *numbeg*), pembibitan (*ngurit*), menanam (*memula* atau *nandur*), merawat tanaman (*majukut*), memanen (*manyi*), dan kegiatan

pascapanen. Perempuan petani *subak* juga bertanggung jawab pada kegiatan di luar usaha pertanian (*off farm*), terutama yang berhubungan dengan ritual-ritual pertanian. Ritual ini mencerminkan kearifan lokal para petani di Bali bahwa setiap aktivitas pertanian yang bersifat fisik (*sakala*) harus dibarengi dengan aktivitas nonfisik (*niskala*), sebagaimana tercermin dalam prosesi ritual menanam hingga memanen padi berikut ini.

Tahap pra-pengolahan tanah diawali dengan pelaksanaan ritual *mapag toya* sebagai tanda mulai mengalirkan air ke lahan sawah. Ritual berikutnya adalah *ngendag mamacul* dari kata '*macun*' (mencangkul) yang menandai tahap dimulainya pengolahan tanah. Tahap selanjutnya adalah ritual *mawinih* atau *ngurit* untuk memulai pembibitan padi. Kegiatan menanam padi (*nandur*) diawali dengan ritual *nuasen mamula*. Setelah padi berusia 42 hari dihitung dari masa tanam dilaksanakan ritual *tutug kambuhan*. Pada masa perawatan padi atau *majukut* dilaksanakan upacara *ngulapin*. Saat padi hamil, diadakan upacara *miseh* dan saat padi mulai berisi dilaksanakan upacara *mabyukukung*. Menjelang panen dilakukan upacara *ngadegang Dewa Nini*, yaitu pemujaan kepada Dewi Sri sebagai wujud syukur atas padi yang sudah siap dipanen. Prosesi memanen padi diawali dengan ritual *manyi*. Ritual terakhir adalah *mantenin* yang dilaksanakan sebelum menyimpan padi ke lumbung (*jineng*). Salah satu wujud kegiatan perempuan petani Subak Bulung Daya dalam aktivitas ritual pertanian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Foto 3. Peran perempuan petani dalam ritual Nuasen Mamula (Foto: Wiasti dan Suarsana, 2022)

Foto 3 tersebut menunjukkan partisipasi perempuan petani Subak Bulung Daya dalam salah satu ritual pertanian, yakni *Nuasen Mamula* yang dilakukan untuk mengawali menanam padi (*mamula* atau *nandur*). Menurut Men Sari (wawancara, 12 Juli 2022), upacara ini bertujuan untuk memohon kepada *Ida Bhatari Sri* agar padi yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan hasilnya banyak. Bagi masyarakat petani di Bali, ritual-ritual pertanian merepresentasikan makna simbolis yang bernilai *supreme* karena ditujukan pada Tuhan sebagai bentuk pemujaan, persembahan, dan permohonan agar usahanya berhasil. Ritual tersebut juga menjadi ucapan rasa syukur atas hasil pertanian yang diperoleh selama ini (Sartini, 2017).

Keterlibatan perempuan petani dalam pelaksanaan ritual-ritual pertanian menunjukkan peran mereka dalam upaya konservasi alam-lingkungan melalui pemujaan, persembahan, dan pemujaan pada Realitas Tertinggi yang diwujudkan dalam sosok feminis Dewi Sri (*Dewa Nini*). Dalam konteks inilah, ekofeminisme perempuan petani Subak Bulung Daya dilandasi prinsip feminitas (*tera mater*) yang bercirikan kedamaian, keselamatan, kasih, dan kebersamaan (Shiva, 1997). Prinsip ini tercermin dalam rutinitas perempuan petani Subak Bulung Daya, baik dalam kegiatan *on farm* maupun *off farm* sebagai upaya untuk mengharmoniskan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam.

4.2 Hegemoni Patriarki dalam Sistem Subak

Perempuan petani Subak Bulung Daya memiliki peran penting dalam kegiatan pertanian dan keagamaan di sawah, tetapi mereka tidak mampu menolak ‘takdir’ lahir sebagai perempuan Bali yang hidup dalam struktur masyarakat patriarki sehingga harus menerima peran-peran sosial yang telah ditetapkan secara kultural. Hegemoni patriarki terhadap perempuan petani Subak Bulung Daya tampak dalam rutinitas keseharian mereka. Menurut Giddens (2010), peran struktur dalam mentransformasi keagenan manusia berlangsung melalui arus tindakan terus menerus (*duree*) dengan melibatkan dua bentuk kesadaran, yakni kesadaran diskursif dan praksis. Kesadaran diskursif melibatkan pengetahuan aktor sehingga mereka dapat menjelaskan motif di balik tindakannya. Sementara itu, kesadaran praksis inheren dalam rutinisasi tindakan sosial sehingga aktor acap kali tidak mampu menjelaskan motif tindakannya.

Kesadaran diskursif perempuan petani Subak Bulung Daya tercermin dari ungkapan kedua perempuan petani di atas (Men Wida dan Men Adi) bahwa mereka bertani untuk membantu suami dan perekonomian keluarga. Ungkapan tersebut mengisyaratkan suatu kesadaran bahwa sesungguhnya perempuan petani tidak bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan membantu ‘yang lain’. Frasa ‘membantu’ yang terkesan natural dan normatif tidak dapat

dipungkiri menunjukkan kuatnya relasi kuasa patriarki di dalamnya karena membantu suami atau menopang perekonomian keluarga berarti melakukan tindakan bagi orang lain, yakni 'laki-laki'. Walaupun demikian, kesadaran praksis perempuan petani Subak Bulung Daya menunjukkan bahwa mereka melakukan aktivitas bertani sebagai kewajiban dan tanggung jawab seorang istri. Dalam konteks inilah, kultur telah mengambil peranan penting dalam membentuk kesadaran perempuan petani.

Menurut Piliang (2006), kultur merupakan sistem yang menggerakkan permainan sekaligus memaksa siapa pun di dalamnya untuk bermain hingga perannya berakhir. Artinya, sepanjang perempuan petani *subak* masih hidup dalam lingkungan patriarki, maka selama itu pula mereka harus memainkan peran yang dikehendaki laki-laki sebagai bentuk kepatuhannya terhadap sistem sosial. Hubungan resiprokal antara sistem sosial dan kultur patriarki mengisyaratkan bahwa kultur patriarki mendasari sistem sosial, sebaliknya sistem sosial menaturalisasi kultur patriarki dalam kesadaran masyarakat.

Resiprokalitas ini menjadi ranah berlangsungnya praktik-praktik hegemoni dalam sistem sosial, yakni penguasaan kelas dominan (*ruling class*) terhadap kelas subordinat (*lower class*) melalui konsensus dan kepemimpinan moral-terapeutik (Patria dan Arif, 2003). Dalam relasi inilah, partisipasi perempuan dalam sistem *subak* seolah-olah menjadi perintah moral yang wajib dilakukan karena mereka berada dalam sistem tersebut.

Mekanisme hegemoni struktural dalam sistem *subak* dapat dicermati dari struktur keanggotaan Subak Bulung Daya, yakni seluruh pemilik lahan pertanian di wilayah *subak* tersebut berdasarkan bukti kepemilikan yang sah atas lahan. Padahal hak kepemilikan atas tanah dalam sistem adat Bali yang acap kali juga diperkuat dengan hukum negara, umumnya dikuasai pihak laki-laki, terutama tanah waris. Pada kasus-kasus tertentu, sistem ini juga diberlakukan pada status kepemilikan tanah kekayaan bersama (*guna kaya*) (Cahyani dan Amelda, 2022).

Aturan ini tentu meminggirkan hak perempuan untuk menjadi anggota *subak* karena mereka tidak memiliki hak kepemilikan yang sah atas lahan sawah yang digarap. Terbukti bahwa tidak ada satu pun perempuan petani Subak Bulung Daya yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di wilayah *subak* tersebut, dan karenanya mereka tidak memiliki hak menjadi pengurus organisasi *subak*. Faktanya, seluruh *prajuru* (pengurus) Subak Bulung Daya adalah laki-laki. Hegemoni struktural ini meminggirkan perempuan petani *subak* untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keberlangsungan sistem *subak*.

Sumbatan struktural tersebut berkelindan dengan mekanisme kultural yang mengkonstruksi peran perempuan petani Subak Bulung Daya. Kultur

ini tercermin pada peran dan fungsi yang mereka mainkan dalam aktivitas *subak*. Mereka dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan terlaksananya ritual-ritual pertanian, sekaligus melakukan pekerjaan bertani selayaknya laki-laki. Bahkan dengan keuletan dan ketelatenannya, mereka mencurahkan waktu yang lebih banyak untuk pekerjaan tersebut.

Pada saat bersamaan, mereka tetap harus melaksanakan peran-peran yang lain dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Artinya, walaupun mereka berperan aktif dalam seluruh aktivitas pertanian dan keagamaan di lahan *subak*, tetapi mereka adalah kelompok kelas dua (*second class*). Mengingat posisi dan peran mereka dimaknai semata-mata hanya untuk membantu suami.

Hegemoni budaya patriarki seperti ini sulit dihindari karena tatanan dunia-kehidupan hampir seluruhnya dibangun di atas landasan kekuasaan laki-laki, seperti pernyataan Capra (2004:14) berikut ini.

“Selama tiga ribu tahun terakhir, peradaban Barat dan pendahulu-pendahulunya, dan kebudayaan-kebudayaan lainnya, telah didasarkan atas sistem filsafat, sosial, dan politik di mana laki-laki dengan kekuatan, tekanan langsung, atau melalui ritual, tradisi, hukum dan bahasa, adat kebiasaan, etiket, pendidikan, dan pembagian kerja menentukan peran apa yang boleh dan tidak dimainkan oleh perempuan di mana perempuan dianggap lebih rendah dari pada laki-laki.”

Penerimaan perempuan petani *subak* atas berbagai peran sosial yang ditetapkan kepada mereka, juga sesungguhnya berkelindan dengan berbagai dimensi yang melingkupi eksistensinya. Lebih dari 80% perempuan petani Subak Bulung Daya hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Tingkat pendidikan yang rendah ini memosisikan mereka pada situasi terbatasnya pilihan untuk terlibat dalam sektor-sektor ekonomi produktif dan mengakses kesempatan pengembangan kapasitas diri. Himpitan kebutuhan ekonomi rumah tangga disikapi dengan sabar dan pasrah, berusaha mencukupkan penghasilan suami, atau dengan cara berhutang.

Ketidakterdayaan tersebut tidak diwariskan secara alamiah, tetapi hegemoni budaya patriarki pun ikut terlibat di dalamnya. Terbatasnya akses perempuan Bali untuk mengenyam pendidikan tinggi menjadi suatu keniscayaan ketika orang tua yang terdidik dalam kultur patriarki cenderung lebih mengutamakan anak laki-laki dalam pendidikan. Artinya, perempuan Bali memang tidak sepenuhnya disiapkan untuk menjadi manusia berdaya yang dapat berkiprah pada ranah publik, karena dalam pandangan patriarki, perempuan hanya disiapkan untuk menggeluti ranah domestik.

Uraian di atas menegaskan bahwa peran dominan perempuan petani dalam aktivitas pertanian ternyata tidak dibarengi dengan pemosisian yang sama dalam sistem *subak*. Perempuan petani terbukti mampu melaksanakan peran ekologisnya dengan baik, seperti menjaga keberlangsungan ritus-ritus *subak* dan mencurahkan banyak waktu dalam aktivitas pertanian di sawah. Akan tetapi, hegemoni patriarki membatasi peluang dan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam sistem *subak*, bahkan diposisikan di luar sistem. Fakta ini mengkonfirmasi pandangan Shiva (1997) bahwa hegemoni patriarki telah mereduksi posisi dan peran perempuan dalam sistem *subak*. Perempuan petani sebagai kelompok subordinat harus menerima peran-peran yang telah ditetapkan oleh kultur, walaupun itu lebih menguntungkan kaum laki-laki dan menyebabkan ketidakadilan bagi mereka sendiri.

4.3 Double Burden: Perempuan Petani dalam Kuasa Patriarki

Budaya patriarki selalu mengklasifikasikan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pertimbangan signifikansi publiknya. Perempuan dinilai bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, yakni ruang domestik yang tidak mempunyai signifikansi publik. Oleh karenanya, perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga kerap dianggap tidak bekerja. Sebaliknya, laki-laki bertanggung jawab atas pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, mengakses sumber-sumber produksi, dan segala yang memiliki signifikansi publik.

Dalam perkembangan budaya, pembagian ini berakar kuat dalam adat istiadat yang kerap membelenggu perkembangan individu (Sukei, 2015). Perempuan Bali yang hidup dalam kultur patriarki harus menerima pembagian kerja tersebut sebagai keniscayaan sosialnya. Walaupun konsekuensinya mereka harus membatasi diri untuk mengakses peran-peran publik yang lebih produktif bagi pengembangan diri, juga bagi keluarganya. Perempuan Bali kerap melewatkan kesempatan kerja dengan alasan takut akan mengabaikan tanggung jawabnya kepada keluarga.

Dalam realitas praksis, tanggung jawab dan peran yang ditetapkan oleh kultur tersebut kerap tidak berjalan sesuai harapan. Misalnya, laki-laki yang bertanggung jawab mencari nafkah ternyata tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Persoalan ini juga dialami oleh beberapa perempuan petani Subak Bulung Daya yang mendorong mereka untuk mencari nafkah tambahan bagi keluarga. Namun, perempuan petani Subak Bulung Daya yang hidup dalam kultur perdesaan dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, keinginan mencari nafkah tambahan ini acap kali menimbulkan dilema kultural yang pelik. Kultur perdesaan yang cenderung konservatif menghendaki agar mereka tetap memikul tanggung

jawab mengurus keluarga, melaksanakan rutinitas ritual keagamaan, dan aktivitas adat istiadat lainnya.

Tingkat pendidikan yang relatif rendah juga mempersempit ruang mereka untuk mengakses pekerjaan yang sesuai tanpa meninggalkan peran domestiknya. Maka dari itu, membantu suami bertani dipandang sebagai pilihan terbaik bagi perempuan petani Subak Bulung Daya agar semua tanggung jawab dapat dipenuhi secara bersamaan, seperti pernyataan Men Wida (47 tahun) berikut ini.

“Dengan ikut membantu suami di sawah, itu sudah cukup membantu keuangan keluarga. Karena kalau mengupah buruh juga bayarannya mahal sekarang. Paling kami hanya cari buruh saat *nandur* (menanam padi) dan *manyi* (memanen) saja. Kalau saya mencari kerja di luar juga susah, karena saya tidak punya keahlian lain, kecuali di sawah. Ibu tahu sendiri kalau di desa, banyak sekali acara adat, belum lagi kalau musim *rahinan* (upacara keagamaan), siapa yang akan mengurus nanti kalau saya kerja keluar. Mau tidak mau, saya bantuin suami di sawah saja. Ya dicukup-cukupkan saja, yang penting dapur bisa mengepul dan anak-anak bisa sekolah (wawancara, 22 Juli 2022).

Ungkapan tersebut menunjukkan peliknya pilihan peran yang harus dijalani perempuan petani Subak Bulung Daya dalam kesehariannya. Pada satu sisi, mereka berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menuntaskan peran-peran domestik. Namun pada saat bersamaan, juga harus membantu suami guna menopang perekonomian keluarga. Multisiplitas peran tersebut mengharuskan perempuan petani *subak* untuk membagi waktu dengan baik dan bekerja lebih keras agar semua tanggung jawabnya terpenuhi. Padahal secara fisik, kekuatan dan ketahanan tubuh perempuan tidak sepenuhnya untuk melakukan pekerjaan bertani di sawah yang relatif berat. Kelelahan fisik tersebut ditambah dengan beban psikis karena waktu bercengkrama bersama suami dan anak-anak menjadi berkurang, bahkan ketika istirahat pun mereka harus memikirkan apa yang mesti dikerjakan esok. Akumulasi semua ini memosisikan perempuan petani *subak* pada keharusan menerima beban ganda (*double burden*) sebagai realitas eksistensial yang harus dijalani dalam kehidupannya.

Beban ganda (*double burden*) merupakan salah satu konsepsi dalam sosiologi gender untuk menyatakan bahwa beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak, daripada jenis kelamin lainnya (Nurhayati, 2015). Dalam budaya patriarki, kondisi *double burden* hampir selalu mengacu pada ketidakadilan gender yang dialami kaum perempuan. Beban ganda kaum perempuan berimplikasi pada peran ibu rumah tangga yang

inheren dengan peran feminis (*feminine role*), dan peran untuk mencari nafkah, baik tambahan maupun utama. Kondisi ini membentuk kesadaran praksis perempuan petani Subak Bulung Daya yang tercermin dari rutinitas tindakan sosialnya. Mengingat eksistensi bermuara pada cara manusia atau masyarakat berada (*exist*) yang bertolak dari kesadaran tentang diri, maka kesadaran perempuan petani *subak* dalam konstruk budaya patriarki adalah perempuan yang menerima kondisi *double burden* tanpa pernah menyadari bahwa mereka sedang mengalami ketidakadilan.

Kondisi ini mengafirmasi kritik ekofeminisme Shiva (1988, 1997, 2005) bahwa kuasa patriarki lebih menguntungkan dan melindungi kepentingan laki-laki yang mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan, juga sekaligus alam-lingkungan. Faktanya, perempuan petani Subak Bulung Daya 'dipaksa' menjalani peran ganda '*double burden*' dengan mengambil sebagian tanggung jawab suami. Sementara suami sebagai pemilik sah hak atas sawah di lahan *subak* memiliki kewenangan lebih besar untuk mengambil segala keputusan pada sawah miliknya. Implikasinya, laki-laki pemilik sawah sewaktu-waktu dapat menggantikan tenaga perempuan petani dengan alat-alat teknologi, bahkan menjualnya. Apabila demikian, maka ritual-ritual persawahan yang didasari nilai-nilai feminitas (Dewi Sri) akan memudar dan menjadi ancaman bagi eksistensi *subak* di Bali. *Double burden* menunjukkan ketidakadilan yang dialami perempuan petani Subak Bulung Daya dalam kuasa patriarki.

Pendekatan etnografi kritis bertendensi membantu, mencerahkan, dan memberdayakan kelompok-kelompok sosial yang mengalami marginalisasi dan ketidakadilan akibat praktik budaya. Studi ini telah mencapai sebagian tujuan tersebut untuk mencerahkan masyarakat bahwa sistem *subak* yang berlaku saat ini mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan petani akibat kuatnya hegemoni patriarki. Namun demikian, studi ini belum mengungkap pemberdayaan perempuan petani *subak* sebagai resistensi terhadap praktik-praktik budaya yang memarjinalkan kedudukan, fungsi, dan peran mereka dalam sistem *subak*. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti-peneliti lain untuk melakukan studi-studi lanjutan mengenai pemberdayaan perempuan petani *subak* di Bali, terutama dalam konteks ekofeminisme.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi perempuan petani Subak Bulung Daya menggambarkan realitas ekofeminisme paradoks. Pada satu sisi, perempuan petani Subak Bulung Daya berperan sentral dalam mengaktualisasikan nilai-nilai ekofeminisme melalui ritual-ritual pertanian yang ditujukan pada manifestasi Tuhan yang berkarakter feminin, yakni Dewi Pertiwi dan Dewi Sri. Namun pada sisi lain,

hegemoni patriarki melalui mekanisme struktural dan kultural dalam sistem *subak* telah meminggirkan peran mereka sebatas komplemen kaum laki-laki. Perempuan petani *subak* pun harus menerima beban ganda (*double burden*) dalam rutinitas kesehariannya. Realitas bahwa perempuan petani *subak* mengalami marginalisasi dan ketidakadilan akibat hegemoni patriarki secara faktual tidak terbantahkan.

Studi ini menemukan bahwa aktivitas perempuan petani *subak* dalam pertanian bersentuhan erat dengan nilai-nilai ekofeminisme dalam menjaga keseimbangan ekologis. Perempuan petani *subak* melaksanakan peran serta tanggung jawab memuliakan alam melalui berbagai ritual pertanian dan kearifan lokal lainnya. Penindasan kuasa patriarki yang dialami perempuan Bali dalam berbagai ranah sosial ternyata tidak memudarkan peran mereka dalam usaha-usaha pembangunan ekologis.

Ucapan Terima Kasih

Studi ini didanai hibah Penelitian Unggulan Program Studi (PUPS), Universitas Udayana tahun anggaran 2021/2022. Untuk itu, ucapan terima kasih dihaturkan kepada Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, dan Koordinator Program Studi Antropologi, Universitas Udayana, beserta para informan.

Daftar Pustaka

- Amsal, B., Putri, R. N. (2022). "Ekofeminisme Ala Masyarakat Kajang: Ilmu dan Amalnya". *Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol. 8, No.1, Juni 2022, pp. 162–188.
- Cahyani, F. A. & Amelda, D.A. (2022). "Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris Adat Bali". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 6 (Juni, 2022), pp. 448–459.
- Capra, F. (2004). *Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Chatterjee, Nilanjana. (2022). "Ecological 'Self' vs the Ecological 'Other': Indigenous Naga Ecotopia for the Dystopic World." *Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory*, 8,2, pp. 29–47.
- Creswell, J. W. (2008). *Educational Research: planning, conducting, and evaluating qualitative and quantitative approaches*. London: Sage Publications Inc.
- Dalopo, B. (2020). "Dari Hutan ke Politik: Studi Ekofeminisme Aleta Baun di Mollo – NTT". *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hukum Internasional*, Vol. 05, No. 2, 2020, pp. 31–51.

- Dyatmikawati, P. (2013). *Kedudukan Hukum Perkawinan Pada Gelahang*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Dwijendra bekerjasama dengan Udayana University Press.
- Firdaus, M. (2021). "Fenomena Ruang Domestik dan Publik Perempuan Bali: Studi Fenomenologi Feminisme di Bali". *Commercium*. Vol. 4, No. 2, Tahun 2021, pp. 161—171.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.
- Gelgel, N. M. R. A. (2016). "Perempuan Gianyar dan Belunggu Ruang Privat dan Ruang Publik". *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 06, No. 1, April 2016, pp. 173—210.
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturalisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Glazebrook, T. (2002). "Karen Warren's Ecofeminism". *Ethics & the Environment*, 7(2), pp. 12-26, 2002.
- Madison, D. S. (2005). *Critical Ethnography: Method, Ethics, and Performance 3rd Edition*. London: Sage Publication Inc.
- Maulana, R., Supriatna, N. (2019). "Ekofeminisme: Perempuan, Alam, Perlawanan Atas Kuasa Patriarki dan Pembangunan Dunia (Wangari Maathai Dan Green Belt Movement 1990-2004)". *FACTUM*, Vol. 8 No.2, Oktober 2019, pp. 261-276.
- Milles, M. B., Huberman, A. M. (1992). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Mulyati. (2019). "Subak, Filosofi Keresasian dalam Masyarakat Agraris di Pulau Bali". *Jantra*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, pp. 75—82.
- Nurhayati, N. (2015). "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)". *MUWAZAH*, Vol. 7, No. 2, Desember 2015, pp. 108—119.
- Palmer, Deborah & Caldas, Blanca. (2016). "Critical Ethnography. Research Methods in Language and Education". *Cham: Springer International Publishing*, pp. 1-12.
- Patria, N. & Arief, A. 2003. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Piliang, Y. A. (2003). "Perempuan dan Mesin Hasrat Kapitalisme: Komodifikasi Perempuan dalam Program Hiburan Media Televisi" dalam *Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme dan Hiburan*. Yogyakarta: LP3Y dan Ford Foundation.
- Priyatna, A., Subekti, M., Rachman, I. (2017). "Ekofeminisme dan Gerakan Perempuan Di Bandung". *Patanjala Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 9 No. 3, September 2017, pp. 439—454.

- Rhoads, E. 2012. "Women's Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali". *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 2/2012, pp. 35–56.
- Sartini, N. W. 2017. "Makna simbolik bahasa ritual pertanian masyarakat Bali". *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 07, Nomor 02, Oktober, 2017, pp. 99–120.
- Shiva, V. (1988). *Staying Alive Women, Ecology and Survival in India*. New Delhi: KALI FOR WOMEN N 84 Panchila Park.
- Shiva, V. (1997). *Bebas dari Pembangunan Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Jakarta: Yayasan Obor bekerjasama dengan KONPHALINDO.
- Shiva, V. (2005). *Earth Democracy Justice, Sustainability, and Peace*. London: North America by South End Press.
- Shiva, V. dan Mies, M. (2005). *Ecofeminisme: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. Yogyakarta: IRE Press.
- Spradley, J. P. 2006. *Metode Etnografi*. Penerjemah: Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suatama, I. B., Cahyaningrum, P. L., Yuliari, S. A. M. 2022. "SHAKTI: Hindu Feminism and Balinese Women Empowerment". *Proceeding Book, 8th ICIIIS International Conference of Interreligious and Intercultural Studies, "Gender, Intersectionality, and Diasporic Communities"*, 25 February 2022, pp. 541 – 554.
- Sukesi, K. 2015. *Gender dan Kemiskinan di Indonesia*. Malang: Lembaga Penerbitan & Percetakan Universitas Brawijaya.
- Sulistiyawati, M. (2018). "Pembangunan dan Feminisasi Tanah di Indonesia (Kajian Ekofeminisme Global)". *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 14 (2), 2018, pp. 84–95.
- Tong, R. P. 2006. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Penerjemah: Aquarini Priyatna Prabasmara. Bandung: Jalasutra.
- Wiasti, N. M. & Arjani, N. L. (2021). "Peranan Perempuan dalam Pemertahanan Ekonomi Keluarga pada Masa Pandemi Covid 19 di Desa Antap Tabanan Bali". *Laporan Penelitian Unggulan Program Studi Universitas Udayana Tahun Anggaran 2021*.
- Wiasti, N. M., Suarsana, I. N. (2022). "Ekofeminisme: Perempuan Petani Subak Bulung Daya di Desa Antap, Tabanan Bali". *Laporan Penelitian Unggulan Program Studi Universitas Udayana Tahun Anggaran 2022*.
- Wiasti, N. M. (2008). "Gender dan Kesetaraan dan Keadilan Gender: Studi Tentang Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Bali". *Jurnal Studi Gender Srikandi*, Vol. 7, No.1, Januari 2008, pp. 1–12.

- Wijayanti, I., Kusuma, N., Pneumatica, O. (2019). "Gerakan Ekofeminisme dalam Pemberdayaan Perempuan Pengolah Limbah (Studi Kasus Komunitas Pengolah Limbah di Desa Narmada)". *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 40–52, 2019, pp. 40–52.
- Wiranata, I. M. A., Putri, P. K. (2021). "Identitas Naratif Aktivis Perempuan: Rekonstruksi Pengalaman dan Orientasi dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Bali". *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 11, No. 02, Oktober 2021, pp. 261–280.
- Yasin, F., Darvina, V. S., Su'adah. (2021). "Gerakan Ekofeminisme Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga pada Komunitas Zona Bening di Kota Batu-Jawa Timur". *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021, pp. 104-119.

Profil Penulis

Ni Made Wiasti menempuh pendidikan S1 di Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, Universitas Udayana; S2 di Program Studi Magister Antropologi, Universitas Gadjah Mada, serta S3 di Program Studi Doktor Kajian Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Saat ini, penulis menjadi dosen tetap Program Studi Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Penulis juga aktif mengajar dan membimbing mahasiswa pada Program Studi Magister dan Doktor Kajian Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Penulis memiliki minat dalam studi-studi perempuan, lingkungan, gender, dan feminisme. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mwiasti@yahoo.com.

I Nyoman Suarsana menempuh pendidikan S1 pada Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, Universitas Udayana, serta S2 pada Program Studi Magister Kajian Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Penulis adalah dosen tetap Program Studi Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Penulis memiliki minat dalam studi tentang budaya agraris, serta etnografi Bali, NTB, dan NTT. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: inyomansuarsana.58@gmail.com.